



The Effectiveness of the City Government's Performance in Addressing the Widespread Student Fights in Padang City

Muhammad Fazrul Hisham¹, Zikri Alhadi²

muhammadfazrulhm@gmail.com

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

Student brawls in Padang City have become an escalating social issue that disrupts public order and hinders the educational process. Data from the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang show significant fluctuations in the number of incidents over the past five years 48 cases in 2020, dropping to 2 in 2022, surging to 103 in 2023, and declining again to 29 in 2024, indicating that government interventions have not yet been consistently effective. This study aims to analyze the effectiveness of the Padang City Government's policies in addressing student brawls and to identify factors hindering their implementation. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and document studies involving local government officials, law enforcement, school representatives, students, parents, and community leaders. The findings reveal that the anti-brawl policy has been largely effective, supported by strong inter-agency coordination, character-building programs, and collaborative governance involving schools and communities. These efforts have reduced brawl incidents by over 85% between 2023 and 2025. However, several obstacles remain, including limited counseling facilities, unequal funding among schools, the negative influence of social media, and inadequate post-program monitoring. The study concludes that sustained policy effectiveness requires enhanced human resource capacity, community engagement, and long-term policy integration through the Regional Action Plan for Student Violence Prevention 2026–2030.

Keyword: Collaborative Governance; Policy Effectiveness; Student Brawls.

PENDAHULUAN

Tawuran antar pelajar di Kota Padang telah menjadi fenomena yang semakin marak dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Fenomena ini mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat proses pendidikan. Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus tawuran mengalami fluktuasi yang signifikan, yakni tercatat 48 kasus pada tahun 2020, menurun drastis menjadi 2 kasus pada tahun 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 103 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 29 kasus pada tahun 2024 (Satpol PP, 2024). Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika kompleks yang belum sepenuhnya teratasi dan menandakan bahwa intervensi pemerintah sejauh ini belum efektif dan berkelanjutan.





Gambar 1. Data Tawuran Kota Padang 2020-2024

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti penyebab dan dampak dari tawuran antar pelajar. Triandiva (2023) menjelaskan bahwa faktor internal seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi dan tekanan dari teman sebaya, serta faktor eksternal seperti kurangnya peran keluarga dan pengaruh lingkungan negatif, menjadi pemicu utama perilaku tawuran. Sementara itu, Maharani et al. (2023) menambahkan bahwa tawuran berdampak luas, mulai dari kerugian fisik, psikologis, ekonomi, hingga sosial, serta menurunkan moralitas dan kualitas pendidikan pelajar. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti penyuluhan dan penertiban oleh Satpol PP, hasilnya belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Beberapa penelitian lain seperti Ingtyas (2017) dan Subiyono et al. (2021) menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan tawuran, dengan melibatkan pendidikan karakter, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, Alawiyah dan Purba (2024) menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten sebagai efek jera, sedangkan Dewantoro (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan crowd policing masih bersifat reaktif dan belum memberikan hasil yang signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan, terutama dalam hal konsistensi program, koordinasi antarinstansi, dan evaluasi hasil kebijakan. Fluktuasi tajam kasus tawuran menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berkelanjutan dan belum menyentuh akar permasalahan sosial di kalangan pelajar Kota Padang.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas kinerja Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi tawuran antar pelajar dan apa kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas strategi pemerintah Kota Padang dalam menangani tawuran antar pelajar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap implementasi kebijakan lokal secara empiris dengan menyoroti aspek koordinasi lintas sektor dan efektivitas tindakan pemerintah dalam konteks sosial khas Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena tawuran antar pelajar serta strategi pemerintah dalam menanganinya. Penelitian dilakukan di Kota Padang, khususnya pada sekolah-sekolah yang sering terlibat dalam tawuran. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak sekolah, pelajar, orang tua, tokoh masyarakat, aktivis sosial, dan pakar kebijakan publik.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara, sedangkan observasi digunakan untuk memahami dinamika sosial di lingkungan sekolah, dan dokumentasi untuk memperoleh data kebijakan serta laporan resmi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi dilakukan untuk menyeleksi data yang relevan, penyajian dilakukan dalam bentuk naratif dan tabel, sedangkan verifikasi dilakukan melalui cross-check dan member checking guna memastikan validitas temuan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Publik dalam Mengatasi Maraknya Tawuran Antar Pelajar

Menurut Mahmudi (2019), efektivitas kebijakan publik merupakan ukuran sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara input, proses, output, dan outcome kebijakan. Efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi program secara administratif, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kelompok sasaran dan perubahan sosial yang ditimbulkannya. Kebijakan pencegahan tawuran di Kota Padang menunjukkan seluruh komponen efektivitas tersebut:

- Input yang kuat melalui penyediaan anggaran pembinaan, tenaga pendidik, dan forum kolaboratif lintas instansi.
- Proses yang berjalan efektif melalui koordinasi terstruktur antara Dinas Pendidikan, Satpol PP, kepolisian, sekolah, dan masyarakat.
- Output berupa pelaksanaan program pembinaan karakter, sosialisasi literasi damai, serta patroli pelajar yang berkelanjutan.
- Outcome yang terlihat nyata berupa penurunan angka tawuran sebesar lebih dari 85% selama periode 2023–2025.

Hasil ini mendukung teori efektivitas kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (2020), yang menyebutkan bahwa suatu kebijakan dianggap efektif bila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya sosial dan administratif yang ditimbulkan. Penurunan tawuran tidak hanya menghemat sumber daya keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain efektivitas administratif, keberhasilan kebijakan ini juga dapat dijelaskan melalui teori tata kelola kolaboratif. Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan bersama antara lembaga pemerintah dan aktor non-pemerintah (masyarakat, sekolah, organisasi sosial) yang dilakukan secara konsensus untuk mencapai kepentingan publik bersama.

Implementasi kebijakan di Kota Padang memperlihatkan ciri-ciri tata kelola kolaboratif sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut, yakni:

- Adanya forum formal seperti *Forum Sekolah Aman* yang mempertemukan pemerintah,

- sekolah, Satpol PP, dan masyarakat.
- b. Keterlibatan langsung pihak non-pemerintah, seperti guru BK, orang tua, tokoh agama, dan LSM pendidikan dalam pembinaan karakter pelajar.
 - c. Komunikasi dua arah yang intensif antara sekolah dan aparat keamanan melalui grup koordinasi digital.
 - d. Tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan berkarakter.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mardiasmo (2021) yang menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik melalui peningkatan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Kota Padang, keterlibatan aktif guru, siswa, dan masyarakat memperkuat keberlanjutan kebijakan karena setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap keberhasilan program. Hasil lapangan juga mendukung temuan Hidayat dan Rahmawati (2022) yang meneliti kebijakan *Sekolah Ramah Anak* di Kota Surabaya, di mana koordinasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat terbukti mempercepat pencapaian tujuan kebijakan pendidikan berbasis karakter.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan dari beberapa studi terdahulu tentang efektivitas kebijakan publik di bidang pendidikan dan kenakalan remaja. Penelitian oleh Rosyid dan Wulandari (2021) di Kota Semarang menemukan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan antar pelajar sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: komitmen pimpinan, dukungan sumber daya manusia, dan partisipasi sekolah. Ketiga faktor ini juga ditemukan dalam penelitian di Kota Padang, di mana komitmen Pemerintah Kota menjadi motor utama, dukungan tenaga pendidik memperkuat implementasi, dan partisipasi pelajar serta masyarakat memperluas jangkauan dampak kebijakan.

Dari kebijakan sosial, penelitian Siregar (2023) juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan perilaku menyimpang akan lebih berhasil apabila melibatkan mekanisme *community-based approach*, yaitu menggerakkan masyarakat lokal untuk ikut mengawasi dan membina remaja di lingkungannya. Pola yang sama juga terlihat di Padang melalui keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam forum pemuda dan ronda remaja.

Analisis Keterkaitan Antar Indikator Efektivitas

Hasil penelitian memperlihatkan keterkaitan kuat antar lima indikator efektivitas kebijakan sebagaimana diuraikan oleh Pasolong (2018), yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

- a. Pertama, pemahaman program di kalangan pelaksana kebijakan dinilai baik. Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan sekolah memahami peran masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
- b. Kedua, tepat sasaran, di mana program pembinaan karakter diprioritaskan untuk sekolah rawan tawuran seperti SMA dan SMK di kawasan Kuranji, Nanggalo, dan Padang Timur.
- c. Ketiga, tepat waktu, yang tercermin dari koordinasi cepat antar instansi saat terjadi indikasi konflik, dengan waktu tanggap rata-rata kurang dari 20 menit sejak laporan diterima.
- d. Keempat, tercapainya tujuan, di mana angka tawuran menurun drastis dan pelajar menunjukkan perubahan perilaku signifikan.
- e. Kelima, perubahan nyata, ditunjukkan dengan peningkatan solidaritas antar sekolah, meningkatnya partisipasi pelajar dalam kegiatan sosial, serta berkurangnya laporan pelanggaran disiplin berat.

Temuan ini mengonfirmasi teori efektivitas oleh Siagian (2018) bahwa efektivitas dapat dilihat dari dua sisi: efisiensi hasil dan dampak jangka panjang. Pemerintah Kota Padang tidak hanya efisien dalam menurunkan angka tawuran, tetapi juga efektif dalam membangun budaya damai yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Kendala dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar

Meskipun kebijakan pencegahan tawuran di Kota Padang tergolong berhasil, terdapat beberapa faktor yang masih menghambat efektivitas jangka panjang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga dan fasilitas pembinaan. Sejumlah sekolah, terutama di wilayah pinggiran, masih kekurangan guru BK dan sarana pendukung seperti ruang konseling, CCTV, dan alat deteksi dini perilaku berisiko. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program tidak merata antar sekolah. Selain itu, pengaruh negatif media sosial juga menjadi faktor signifikan. Banyak pelajar terpapar konten provokatif yang memicu perkelahian spontan di luar lingkungan sekolah, meskipun upaya pencegahan kini lebih cepat dilakukan melalui koordinasi lintas pihak.

Ketimpangan anggaran antar sekolah turut menjadi penghambat lain, karena tidak semua sekolah memiliki alokasi dana khusus untuk kegiatan pembinaan karakter. Ketergantungan terhadap bantuan APBD membuat keberlanjutan program bergantung pada siklus kebijakan tahunan. Di sisi lain, keterbatasan tenaga psikolog pendidikan menghambat penanganan kasus perilaku agresif yang memerlukan pendekatan profesional. Monitoring pascaprogram juga masih minim, karena evaluasi cenderung berfokus pada pelaksanaan, bukan pada tindak lanjut terhadap siswa setelah pembinaan.

Namun, hambatan-hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kemitraan lintas lembaga. Pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kekerasan Pelajar 2026 – 2030 sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi tawuran antar pelajar tergolong efektif. Efektivitas ini tercermin dari keberhasilan merumuskan kebijakan yang responsif dan kolaboratif melalui program seperti Sekolah Aman dan Damai, Forum Sekolah Anti Tawuran, dan Pelajar Bijak Bermedsos. Pelaksanaan kebijakan berlangsung sistematis dan berorientasi pada pencegahan, dengan dukungan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Tercermin dari penurunan kasus tawuran lebih dari 85% serta peningkatan disiplin dan karakter pelajar. Namun, efektivitas ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan guru BK, ketimpangan fasilitas sekolah, serta pengaruh negatif media sosial, yang menandakan perlunya kebijakan yang lebih berkelanjutan dan adaptif.

Penelitian ini memiliki batasan pada ruang lingkup wilayah hanya di Kota Padang dan pendekatan yang berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah, tanpa membandingkan efektivitas di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian ke wilayah lain, membandingkan efektivitas antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, S., & Purba, N. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Study pada SMK Al Washliyah 4 Medan)*. 4(5), 1738–1752.

Annisa Intan Maharani, Agnes Clara Nainggolan, Istiharoh Istiharoh, Pramasheila Arinda



- Putri, & Riyan Adhitya Pratama. (2023). Analisis Fenomena Penyimpangan Sosial: Tawuran Remaja Dalam Teori Anomie Emile Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 139–154. <https://doi.org/10.56910/jispendingora.v2i3.978>
- Basri, S. H. (2020). FENOMENA TAWURAN ANTAR PELAJAR DAN INTERVENSINYA. 3-7.
- Bryson, J., & George, B. (2024). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 6th Edition*.
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press. <https://books.google.co.id/books?id=qmGEiPU-O-cC>
- Dewantoro, D. (2023). Crowd Policing Guna Mencegah Konflik Tawuran Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Yang Kondusif. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 14. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.420>
- Elita, L. N., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 2402-2407.
- Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Publishing Group.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence (galtung).pdf. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
- Ingtyas, F. T. (2017). Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 1–12. <https://doi.org/10.24114/jkss.v15i2.8769>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- Kurniawan1, S., & Rois, M. (2020). TAWURAN, PRASANGKA TERHADAP KELOMPOK SISWA SEKOLAH LAIN, SERTA KONFORMITAS PADA KELOMPOK TEMAN SEBAYA. 4(2), 85-94.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Macpherson, W. (2008). What is Strategy? East and West. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2364272>
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2005). *Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Mangament*. Free Press.
- Novariantio, W., Raharjo, E., & Fathonah, R. (2018). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal.Fh.Unila*, 1(1), 1–13.

jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/.../958

- Ogbeiwi, O. (2017). Why written objectives need to be really SMART. *British Journal of Healthcare Management*, 23, 324–336. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2017.23.7.324>
- Oktoriny, F., Puspita, L., & Jemmy, M. (2024). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR. *Jurnal Pengabdian masyarakat Dewantara*, 7(1), 31-34.
- Rafifa, D. O., Danil, E., & Yoserwan. (2024). Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah*, 22(2), 135-138.
- Satpol, P. (2024). *Laporan Kegiatan Penertiban Pelajar Terlibat Tawuran*. <https://satpolpp.padang.go.id/>
- Subiyono, Mulyani, A. S., Nurishlah, L., & Damayanti, G. (2021). Pendidikan Berbasis Karakter Cinta Damai di SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JIWP*,(1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10802611>
- Steers, R. (1985). *Organizational Effectiveness, A Behavioral View*. Jakarta: Kerjasama LP2M dan Penerbit Erlangga.
- Triandiva, M. (2023). Dampak Tawuran antar Pelajar di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.9514>
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. Pearson Prentice Hall.
- Wood, J. (2017). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th edition) Christopher W. Moore (Jossey-Bass, 2014). *Mediation Theory and Practice*, 2, 84–88. <https://doi.org/10.1558/mtp.33140>.